

OPERASI MILITER SELAIN PERANG TNI AL MENANGGULANGI PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN DI LUAR YURISDIKSI NASIONAL

Whisnu Kusardianto

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang
Email: dikreg044_50@yahoo.com

Abstract

This research is motivated by the matters in the absence of provisions in national legislation that governing Military Operation Other Than War (MOOTW) by Indonesian Navy beyond areas of national jurisdiction. Indonesian Navy as the main constituent of law and order enforcement at the Indonesia waters needs to improve its ability to accomplish its responsibility well. The purpose of this paper is to determine whether national legislation has accommodated MOOTW by Indonesian Navy beyond national jurisdiction. This method of writing is to review and to analyze the legislation of the role of the Indonesian Navy in implementing MOOTW beyond national jurisdiction. Indonesia Navy's imperative responsibility to execute non-combat military operation in security area is implemented in securing national and international marine route and Indonesia ships which are sailing outside Indonesian waters from piracy. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 Nomor 3) about Defense (furthermore is called Defense regulation) and Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127) about Indonesian Armed Forces (furthermore is called Indonesian Armed Forces regulation) have not regulate thoroughly the authority to overcome military threat and assist Indonesian government in surmounting piracy against Indonesian ships outside Indonesian waters. As the result of the analysis of this paper is need for additional provisions in national legislation which specifically regulates MOOTW by Indonesian Navy beyond national jurisdiction.

Key words: *piracy, military operation other than war beyond areas of national jurisdiction, Indonesian Navy*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan belum adanya ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan nasional yang mengatur tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI Angkatan Laut (TNI AL) di luar yurisdiksi nasional. TNI AL sebagai komponen utama penegak hukum dan kedaulatan di laut, kemampuannya perlu ditingkatkan guna mampu melakukan tugas tersebut dengan baik. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui apakah peraturan perundangan-undangan nasional telah mengakomodir OMSP TNI AL di luar yurisdiksi nasional. Metode penulisan ini mengkaji dan menganalisa peraturan perundangan-undangan tentang peran TNI AL dalam melaksanakan OMSP di luar yurisdiksi

nasional. Tugas TNI AL yang tidak kalah pentingnya dalam melaksanakan OMSP di bidang keamanan diimplementasikan dalam bentuk mengamankan jalur-jalur pelayaran nasional maupun internasional, kapal-kapal berbendera Indonesia yang sedang berlayar di luar perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia dari tindakan pembajakan dan perompakan. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 Nomor 3) tentang Pertahanan (selanjutnya disebut undang-undang pertahanan) dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127) tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut undang-undang TNI), belum mengatur secara detail tentang kewenangan untuk mengatasi ancaman bersenjata dan membantu pemerintah dalam menangani pembajakan kapal-kapal Indonesia di luar laut yurisdiksi nasional. Adapun hasil dari analisa tulisan ini yaitu perlu adanya penambahan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang khusus mengatur tentang pelaksanaan OMSP TNI AL di luar yurisdiksi nasional.

Kata kunci: pembajakan kapal di laut, OMSP di luar yurisdiksi nasional, TNI AL

Latar Belakang

Keamanan laut yurisdiksi nasional dan perairan internasional sebagai jalur-jalur pelayaran telah lama menjadi perhatian serius dunia khususnya bagi negara-negara pantai yang secara langsung memiliki kepentingan di dalamnya. Salah satu fungsi laut adalah sebagai jalur transportasi yang menghubungkan satu negara dengan negara lain untuk kepentingan berbagai macam kegiatan. Mengingat fungsi tersebut memiliki nilai yang tinggi bagi negara kepulauan, maka kejahatan sering terjadi di laut yang mengancam keamanan pelayaran, perdagangan yang mengakibatkan korban jiwa bagi awak kapal, kerusakan fisik kapal, kerugian barang yang diangkut serta kerugian bagi pemilik kapal. Perairan laut yurisdiksi maupun internasional yang tidak terjamin keamanannya, maka membawa konsekuensi logis pada dampak kerugian ekonomi secara global. Oleh karena itu, keamanan laut bukan hanya mewakili kepentingan suatu negara tetapi juga menjadi kepentingan kawasan (regional).

Ancaman dalam kerangka keamanan sosial terbagi menjadi dua, yaitu ancaman vertikal dan ancaman horizontal. Berdasarkan Buzan dan Waeber yang ditulis oleh Makmur Keliat, bahwa ancaman vertikal yaitu ancaman yang mengakibatkan identitas suatu kelompok sosial melemah pada titik terjadinya disintegrasi atau secara nyata terkekang oleh suatu kekuatan politik, sedangkan

Ancaman horizontal yaitu beberapa identitas yang saling bersaing dalam suatu kelompok sosial.¹

Dinamika lingkungan strategis, baik regional maupun global, turut mempengaruhi karakteristik ancaman dengan timbulnya isu-isu keamanan yaitu Trans National Crime (kejahatan lintas negara), terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal.²

Geoffrey Till mengatakan bahwa konsep keamanan maritim adalah suatu frasa baru. Hal ini berarti bahwa keinginan terhadap kepentingan maritim kini tidak hanya yang bersifat tradisional seperti keinginan untuk pengiriman ekspedisi operasi militer jangka pendek (*espenditionary operations*) dan melakukan pengendalian (*sea control*). Selain itu ada keinginan pula untuk mewujudkan apa yang dikenal dengan *maintaining good order at sea* (pemeliharaan tatanan di laut) karena laut kini tidak hanya sebagai wilayah tetapi juga sebagai media transportasi, sumber daya alam, dan sebagai aspek yang penting dari lingkungan hidup. Seperti yang disampaikan oleh Geoffrey Till “*Because it confers the capacity to use the sea while denying that use to the adversary, command of the sea is often important an sometimes cricial at the strategic level of war. Unsurprisingly, the possible ways of achieving or maintaining this advantageous state have dominated the theory and practice of naval warfare.*”³

TNI AL sebagai komponen utama dalam melaksanakan penegakan wilayah dan hukum di laut melaksanakan perananan diplomasi, polisionil dan pertahanan. Tugas TNI AL yang tidak kalah pentingnya dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di bidang keamanan laut dilaksanakan dalam operasi pengamanan jalur-jalur pelayaran nasional maupun internasional, pengamanan kapal berbendera Indonesia yang berlayar di luar perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia dari tindakan pembajakan dan perompakan.⁴ Dihadapkan dengan tugas dan dinamika ancaman yang bersifat faktual dan potensial, maka

¹ Keliat, Makmur, **Kemanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya bagi Indonesia**, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 13 No. 1, Juli 2009, **penerbit / lembaga yang mencetak**, hlm. 111-129.

² Kementerian Pertahanan RI, **Buku Putih Pertahanan Indonesia**, Kemenhan, Jakarta, 2008, hlm. 12.

³ Geoffrey Till, **Seapower A Guide for the Twenty-First Century**, Routlege, USA dan Canada, 2009, hlm. 156.

⁴ Ali Ridlo, S.H., M.M, **Bila Letkol Ali Ridlo Bicara Soal UU Pertahanan Negara dan UU TNI**, <http://www.tnial.mil.id>, diakses 8 Juni 2015 pukul 12.44 WIB.

TNI memposisikan diri untuk berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan dan mengemban fungsi sebagai penangkal terhadap segala bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata lainnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, TNI perlu di payungi perundang-undangan dalam pengiriman pasukan untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan di luar perairan yurisdiksi nasional dalam rangka melindungi Kepentingan Nasional.⁵ Dalam kepentingan mengamankan dari tindak pidana pembajakan di luar yurisdiksi, pelibatan TNI belum diatur secara detail melalui peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 Nomor 3) tentang Pertahanan (selanjutnya disebut undang-undang pertahanan) dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127) tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut undang-undang TNI), belum mengatur secara detail tentang kewenangan untuk mengatasi ancaman bersenjata dan membantu pemerintah dalam menangani pembajakan kapal-kapal Indonesia di luar laut yurisdiksi nasional. Undang-Undang di atas belum menyebutkan tentang mekanisme keputusan politik dan adanya dukungan politik dari DPR tentang pengiriman pasukan di luar laut yurisdiksi nasional dalam penegakan hukum terhadap pembajakan dalam rangka melindungi kepentingan nasional.

TNI Angkatan Laut sebagai salah satu bagian dari komponen utama kekuatan nasional Indonesia tidak dapat lepas dari dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang dan kompleks. Bentuk ancaman dan tantangan yang digolongkan dalam bentuk non tradisional dapat diketahui misalnya keamanan pelayaran, keamanan terhadap pengelolaan sumber daya energi yang tersebar di seluruh perairan nasional Indonesia.⁶ Dalam perkembangan terakhir yaitu dibajaknya kapal *bulk carrier* berbendera Indonesia yaitu MV Sinar Kudus pada 16 Maret 2011 pada posisi 320 mil laut sebelah timur laut Pulau Sokotra di Samudera India telah dibajak oleh para pembajak Somalia.⁷ Peristiwa ini menunjukkan bahwa ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh TNI Angkatan

⁵ *Ibid.*

⁶ Mabesal, **Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya**, Mabesal, Jakarta, 2006, hlm. 8.

⁷ Willy F. Sumakul, **Operasi Keamanan Laut dan ASEAN Maritim Forum**, <http://www.fkpmaritim.org.>, diakses 31 Juli 2015 pukul 11.15 WIB.

Laut tidak saja yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia tetapi juga di luar yurisdiksi nasional.⁸

Dari contoh (*case study*) pembajakan yang sedang melakukan perjalanan lintas negara dan membutuhkan perlindungan keamanan dalam melaksanakan tugas mereka. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia baik yang berada di dalam wilayah kedaulatan teritorial maupun di luar yurisdiksi nasional

Pembahasan

A. Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI AL di Luar Wilayah Yurisdiksi Nasional

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 TNI, belum mengatur secara detail yang diwujudkan menurut pasal-pasal dalam mengatasi ancaman pembajakan di luar perairan Yurisdiksi Nasional. Kedua undang-undang di atas belum menyebutkan tentang mekanisme keputusan politik dan adanya dukungan politik dari DPR tentang pengiriman pasukan di luar perairan Yurisdiksi Nasional dalam penegakan hukum terhadap pembajakan dalam rangka melindungi Kepentingan Nasional.

Berkaitan dengan kejadian pembajakan terhadap MV. Sinar Kudus di Teluk Aden Somalia, dimana pemerintah RI berkeputusan untuk mengatasi pembajakan tersebut, kemudian atas perintah Presiden, Panglima TNI membentuk Satuan Tugas (Duta Samudera dan Merah Putih). Dalam konteks yuridis di dalam Undang-undang Pertahanan belum dijelaskan secara rinci di dalam pasal-pasal tentang pengiriman pasukan di luar perairan Yurisdiksi Nasional dalam penegakan hukum, tetapi di dalam pasal-pasal Undang-undang Pertahanan Negara hanya menjelaskan secara umum. Adapun pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 Nomor 3) tentang Pertahanan Negara yang terkait dalam pengiriman pasukan di luar perairan Yurisdiksi Nasional adalah sebagai berikut :

⁸ Alman Halves Ali, **Operasi TNI Angkatan Laut di Luar Wilayah Yurisdiksi Nasional Suatu Tinjauan**, <http://www.fkpmaritim>, diakses 8 Juni 2015 pukul 20.15 WIB.

Pasal 10 angka (3) huruf c yaitu Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk : melaksanakan Operasi Militer Selain Perang. Operasi ini berdasarkan Undang-undang TNI untuk mengatasi pemberontakan bersenjata dan membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.⁹

Tugas TNI dalam melaksanakan penegakan hukum di luar perairan Yurisdiksi Nasional, belum di jelaskan secara rinci di dalam Undang-undang Pertahanan negara tentang di mana tempat atau wilayah yang akan dilaksanakan operasi TNI, sehingga menimbulkan penafsiran bahwa TNI dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang hanya berada di perairan Yurisdiksi Nasional. Mengacu kepada Hukum Internasional yaitu UNCLOS 1982 Pasal 100, bahwa negara Indonesia dapat bekerjasama dengan negara lain untuk menindak pembajakan serta mengatur kekebalan kapal perang di laut lepas yaitu memiliki kekebalan penuh terhadap Yurisdiksi negara manapun selain Negara bendera. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kapal perang dapat berlayar ke laut lepas berdasarkan UNCLOS 1982 tetapi dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, hal ini belum di atur secara detail.

Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pasal ini di sebutkan bahwa pengerahan pasukan TNI menghadapi ancaman bersenjata adalah kewenangan Presiden sebagai Panglima tertinggi, namun pada pasal ini belum dijelaskan tentang tempat terjadinya ancaman bersenjata dan bagaimana mekanismenya hubungan antara Panglima TNI, Presiden dan DPR dalam pengerahan pasukan untuk mendapat dukungan politik dari DPR. Ketika ada ancaman bersenjata di luar perairan Yurisdiksi Nasional, misalnya kasus pembebasan MV. Sinar Kudus di Somalia, ketika Presiden memerintahkan Panglima TNI untuk melaksanakan Operasi pembebasan, tentunya pergerakan TNI dalam melaksanakan tugas perlu

⁹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 Nomor 3) tentang **Pertahanan Negara**.

dipayungi peraturan Perundang-undangan. Bahwa pengerahan pasukan, di dalam Undang-undang Pertahanan belum disebutkan bagaimana mekanisme Panglima TNI mendapat perintah dari Presiden, bagaimana mekanisme dukungan anggaran dan bagaimana Presiden mendapat persetujuan dan atau tidak mendapat persetujuan dari DPR kemudian disampaikan lagi kepada Panglima TNI.

Mekanisme ini mempengaruhi proses perencanaan TNI dalam pengerahan pasukan TNI di luar perairan Yurisdiksi Nasional, karena menyangkut beberapa faktor diantaranya tempat jauh, kondisi alat sista dan personel, termasuk kepentingan negara dalam melindungi warga negaranya.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127) tentang TNI. Mengacu pembajakan MV. Sinar Kudus, TNI AL dalam melaksanakan tugas dengan mengirim pasukan di luar perairan Yurisdiksi Nasional yaitu Somalia yang berdampak pada dukungan anggaran negara dan dukungan politik. Dalam hal ini pelaksanaan tugas TNI/TNI AL harus selalu dipayungi dan berdasarkan undang-undang.

Kepentingan Indonesia tidak hanya berada di dalam perairan Yurisdiksi Nasional, tetapi banyak tersebar di luar perairan Yurisdiksi Nasional, contohnya kapal Indonesia yang berlayar setiap hari ke laut lepas menuju negara lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan perangkat hukum atau kekosongan hukum, tentunya secara yuridis berdampak negatif pada pelaksanaan tugas pokok TNI dan berpotensi menimbulkan kendala antara lain absennya dukungan politik. Adapun pasal yang dapat dikorelasikan dalam operasi pengiriman pasukan TNI di luar yurisdiksi nasional menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127) sebagai berikut :

1. Pasal 7 Ayat (1): Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹⁰ Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa tugas pokok TNI melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, memberikan suatu payung hukum bagi TNI untuk

¹⁰ Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127) tentang **Tentara Nasional Indonesia**.

melaksanakan tugas. Pada sisi lain ancaman yang terjadi berdasarkan perkembangan lingkungan strategis dapat terjadi di dalam dan di luar perairan yurisdiksi nasional, sedangkan dalam pasal di atas belum delik-delik kejahatan tertentu yang terjadi di laut.

2. Pasal 7 Ayat (2) huruf n sebagai berikut: membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.¹¹ Dalam pasal ini, TNI dalam melaksanakan OMSP, belum disebutkan dimana tempat terjadinya tindak pidana. Perkembangan ancaman yang terjadi, tidak bisa diprediksi secara jelas kapan terjadinya tindak pidana dan kapan waktunya seperti pembajakan MV. Sinar Kudus, yang terjadi di luar perairan Yurisdiksi Nasional.
3. Pasal 9 ayat b, sebagai berikut: Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.¹² Pada Pasal 9 tersebut secara tegas memberikan kewenangan kepada Angkatan Laut untuk melaksanakan penegakan hukum di wilayah sesuai yurisdiksi nasional negara pantai. Dalam perkembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan terhadap kapal dapat pula terjadi di luar perairan yurisdiksi nasional, sehingga berdampak pada kepentingan internasional. Korelasi hubungan antara tugas Pokok TNI Angkatan Laut berdasarkan hukum internasional telah diatur menurut UNCLOS 1982 yang mengatur setiap negara pantai dan negara peserta untuk melaksanakan tugas tidak hanya di dalam perairan yurisdiksi nasional melainkan juga mencakup perairan di luar yurisdiksi nasional.
4. Pasal 20 ayat (2): Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. TNI sebagai alat negara, sewaktu waktu dapat di perintahkan untuk melaksanakan tugas dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, yang telah mendapat ancaman baik di dalam negeri maupun di luar negeri. TNI dalam melindungi segenap bangsa Indonesia,

¹¹ Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127) tentang **Tentara Nasional Indonesia**.

¹² *Ibid.*

dilaksanakan dimana saja, termasuk di luar perairan Yurisdiksi Nasional. Dalam melaksanakan operasi seperti ini, tentunya TNI AL perlu diatur dalam tataran Undang-Undang. Sementara dalam pasal di atas, belum mengatur operasi militer selain perang (OMSP) yang dilaksanakan di luar perairan yurisdiksi nasional.¹³

Dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang, TNI AL harus memperhatikan eskalasi ancaman yang terjadi. Perkembangan lingkungan strategis yang di pengaruhi Global, Regional dan Nasional juga membawa dampak terhadap ancaman pemberontakan bersenjata yang tempat terjadinya tindak pidana pembajakan tidak dapat di prediksi, dapat terjadi di dalam perairan yurisdiksi nasional maupun di luar perairan yurisdiksi nasional. Mengamati ketentuan di atas, TNI AL dalam menegakkan hukum di wilayah laut dibatasi kewenangan *locus* di yurisdiksi nasional, namun ancaman pembajakan dan perompakan dapat terjadi di luar perairan yurisdiksi nasional.

B. Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Internasional Mengakomodir Pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang TNI AL dalam Menanggulangi Tindak Pembajakan dan Perompakan di Luar Yurisdiksi Nasional

Dalam studi kasus (*case study*) pembajakan laut perairan Somalia (laut wilayah) yang sering terjadi hingga sekarang ini, diketahui bahwa kewenangan yurisdiksi penanggulangannya seharusnya adalah Negara Somalia akan tetapi Pemerintah Somalia tidak memiliki kemampuan armada, SDM, anggaran, organisasi dan sebagainya. Untuk mengatasi masalah ini dunia internasional melalui organisasi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) akhirnya mengeluarkan beberapa Resolusi (*Security Council Resolution*) mulai dari Nomor 1814 Tahun 2008 sampai dengan Nomor 1976 Tahun 2011 (11 April 2011) yang pada dasarnya membutuhkan kerjasama internasional untuk memberantas pembajakan di perairan laut Somalia dengan mempertimbangkan ketidakmampuan Pemerintah Somalia dalam memberantas pembajakan laut di wilayahnya sendiri. Beberapa Resolusi DK PBB menekankan beberapa hal sebagai berikut:

¹³ Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127) tentang **Tentara Nasional Indonesia**.

- (1) *Urges States whose naval and military aircraft operate on the high seas and airspace off the coast of Somalia to be vigilant to acts of piracy and armed robbery and encourages States using the commercial maritime routes off the coast of Somalia to increase and coordinate their efforts to deter acts of piracy and armed robbery” (Resolusi DK No. 1816-2008);*
- (2) *“calls on all States, including States in the region, to criminalize piracy under their domestic law and favourably consider the prosecution of suspected, and imprisonment of convicted, pirates apprehended off the Coast of Somalia” (Resolusi DK No. 1918-2010);*
- (3) *“re-authorizes States, Regional Groups to intervene at sea in the case of Piracy and Armed Robbery off Somalia’s coast” (Resolusi DK No. 1950-2010);*
- (4) *“calls upon States to cooperate as appropriate on the issue of hostage taking” (Resolusi DK No. 1976-2011).*

Setiap Pemerintahan suatu Negara yang berperan aktif dalam keanggotaan PBB memiliki kewajiban untuk mendukung dan melaksanakan Resolusi ini khususnya kejadian tersebut menimpa kapal-kapal sipil berbendera dan warga negaranya ada di dalamnya.

1. Beberapa upaya untuk menebus para sandera antara pihak perusahaan dengan pihak pembajak akan ditanggung oleh pihak asuransi. Namun persoalan pembajakan tidak berhenti di sini. Hal yang harus tindaklanjuti adalah upaya untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pembajakan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk membuat efek jera misalnya dengan penyerangan secara sistematis kepada para pembajak dan menyidangkan dengan penerapan sanksi pidana yang seberat-beratnya. Jika pembajakan ini dibiarkan dan diselesaikan secara perkasus dengan cara membayar uang tebusan, maka dampak ganda akan justru akan memancing suburnya pembajakan berikutnya dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Para pembajak akan tergoda untuk mencoba lagi karena yakin bahwa pasti akan dibayar.
 - b. Setiap kapal akan berlomba-lomba memakai asuransi dan pihak asuransi akan menerapkan biaya asuransi yang cukup mahal mengingat

resiko yang akan ditanggungnya juga cukup tinggi. Hal ini berarti secara tidak langsung membiarkan pembajakan tetap terjadi dan akan semakin menaikkan biaya pengiriman barang yang akibatnya akan mempengaruhi harga jual barang, sehingga perdagangan internasional terganggu, karena tidak lagi efisien dan berbiaya tinggi.

2. Setiap Negara memiliki kekuasaan yurisdiksi dalam hukum internasional, termasuk yurisdiksi terhadap warga negaranya di manapun mereka berada, baik secara yurisdiksi nasional aktif (di mana warga negaranya menjadi korban kejahatan) maupun yurisdiksi nasionalitas pasif (di mana warga negaranya menjadi korban dari kejahatan). Setiap Negara berbeda-beda dalam menerapkan upaya yurisdiksinya tersebut. Dalam hal pembajakan KM Sinar Kudus di perairan Somalia menunjukkan bahwa awak kapal yang sebagian besar adalah warga negara Indonesia, maka dapat dikelompokkan bahwa Indonesia memiliki kuasa dan wewenang hukum internasional dalam kapasitasnya sebagai yurisdiksi pasif. Warga negara yang menjadi awak kapal tersebut menjadi korban kejahatan pembajakan yang dilakukan di dalam teritorial dan juga dilakukan oleh warga Somalia.

C. Upaya Mengatasi Pembajakan

Untuk menumpas pembajakan di laut, maka seharusnya negara yang dirugikan mengerahkan pasukannya untuk mengejar dan menangkap pembajak tersebut. Penyelesaian secara hukum tindak kejahatan pembajakan di laut dapat pula diselesaikan di Pengadilan Internasional (*International Court Justice/ ICJ*) untuk mengadilinya, karena negara yang dirugikan itu memiliki yurisdiksi terhadapnya apalagi diperkuat dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dalam kasus pembajakan di perairan laut Somalia, Negara yang dirugikan oleh tindak perompak tersebut berhak menangkap dan mencampuri kedaulatan di suatu negara (Prinsip Universal). J.G.Starke menyatakan bahwa:

“Perompakan merupakan suatu tindak pidana yang berada di yurisdiksi semua negara dimanapun tindakan itu dilakukan, tindakan pidana itu merupakan bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional,

maka tindakan itu dipandang sebagai delik *Jure Gentium* dan setiap negara berhak menangkap dan menghukum semua pelakunya”¹⁴.

Kejahatan-kejahatan delik dari perompak dan Kejahatan Perang, menimbulkan Pertimbangan-pertimbangan yang agak berbeda. Berdasarkan piagam PBB, sangat jelas diatur bahwa negara peserta (*contracted state*) berhak menuntut kepada PBB agar segera menciptakan keamanan di wilayah Teluk Aden Somalia. Wilayah laut tersebut adalah bagian dari teritorial Somalia, namun dikarenakan lemahnya Penegakan hukum di Somalia serta berbagai krisis yang melanda negara tersebut, maka Pemerintah Somalia tidak dapat berbuat banyak dalam rangka mengamankan wilayah tersebut. Salah satu jalan yang dapat dilakukan oleh PBB adalah dengan meningkatkan keamanan di wilayah tersebut, melalui organ keamanannya dan bekerjasama dengan negara-negara kawasan atau negara yang memiliki kepentingan melintasi jalur pelayaran tersebut. Selain ketentuan di atas, pengaturan terhadap perompakan secara khusus telah dilakukan oleh PBB, yaitu dengan disahkannya Konvensi Hukum Laut Internasional, 10 Desember 1982. Di dalam Konvensi ini secara umum telah dibahas mengenai pembajakan laut pada Pasal 100-107.¹⁵ Di dalam pasal-pasal tersebut tercantum ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 100 mengenai kewajiban bekerjasama terhadap pemberantasan pembajakan laut,
2. Pasal 101 mengenai definisi pembajakan laut,
3. Pasal 102 mengenai pembajakan oleh kapal perang, kapal negara atau pesawat di mana digunakan untuk memberontak,
4. Pasal 103 mengenai definis kapal dan pesawat pembajak,
5. Pasal 104 mengenai kepemilikan atau hilangnya warga negara pembajak,
6. Pasal 105 mengenai penangkapan kapal atau pesawat pembajak,
7. Pasal 106 mengenai tanggung jawab ketika melakukan penangkapan tanpa pertimbangan,

¹⁴ Huala, Adolf, **Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional**, Grafindo Persada, Bandung, 2002, hlm. 166.

¹⁵ Undang-undang Nomor 17 Tahun 1982 (LN RI Tahun 1982 Nomor 76) tentang **Ratifikasi United Nation of the Law of the Sea**.

8. Pasal 107 mengenai kapal dan pesawat yang berwenang melakukan penangkapan untuk alasan pembajakan.

Konvensi ini berlaku bagi setiap negara yang telah meratifikasi dan juga berlaku bagi negara yang belum meratifikasi. Hal ini dikarenakan permasalahan dalam konvensi ini menyangkut keamanan dan kejahatannya bersifat umum, yaitu seluruh negara mengakui bahwa perompakan merupakan kejahatan.

Dalam peristiwa hukum internasional ini, yang perlu diangkat dan dijadikan dasar pelaksanaan penegakan hukum oleh PBB adalah Pasal 1 sebagai berikut: Semua Negara akan bekerja sama sejauh mungkin dengan pemberantasan pembajakan laut di laut lepas atau di tiap tempat lain di luar daerah kekuasaan hukum sesuatu Negara.

Selanjutnya dipertegas kembali pada Pasal 105 yang memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menangkap perompakan lalu memberikan sanksi terhadap pelaku perompakan tersebut. Selain negara, organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional berhak melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap perompakan. Misalnya yang dilakukan oleh North Atlantic Treaty Organization (NATO), organisasi internasional ini memiliki misi khusus menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Atlantik dan berkomitmen juga untuk membantu pengamanan di kawasan Afrika.

Melihat sifat gangguan keamanan berupa pembajakan dan perompakan dilakukan oleh warga negara Somalia, PBB dalam rangka meningkatkan keamanan di wilayah Teluk Aden harus bekerjasama dengan subjek HI lainnya, yaitu dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan yang sama dan dengan negara-negara yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan bantuan ke wilayah tersebut dan memiliki kepentingan terhadap keamanan di wilayah itu. Tindakan ini merupakan tindakan yang paling cepat dan efektif sebelum kejahatan tersebut membesar dan semakin membahayakan kawasan lainnya sebagaimana diatur pada Pasal 107 : Penangkapan lantaran perompakan hanya boleh dilakukan oleh kapal-kapal perang atau pesawat terbang militer atau kapal atau pesawat terbang lain yang sedang menjalankan tugas pemerintahan dengan tugas untuk maksud itu.

Atas tindakan yang dilakukan para pelaku perompakan dapat diadili menurut hukum negara yang memungkinkan mengadili kejahatan tersebut. Jika Somalia tidak memiliki kemampuan dalam menegakkan hukumnya, maka Negara tatangga yang memiliki kepentingan dalam rangka meningkatkan keamanan dan memiliki peraturan mengenai kejahatan perompakan berhak untuk mengadili para perompak. Hal ini apa yang telah dilakukan oleh Royal Navy Inggris, yang menyerahkan tindak pelaku kejahatan perompak kepada pengadilan Kenya.

Resolusi DK PBB No. 1816 tentang Perompak Somalia ini telah disepakati. Resolusi No. 1816 tersebut disahkan dengan suara bulat oleh 15 anggota Dewan Keamanan (DK) di Markas Besar PBB, New York dan intinya memberikan kewenangan kepada negara-negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap perompak di sekitar perairan Somalia.

Permasalahan lain muncul, yaitu walaupun telah dilakukan pengamanan di wilayah Laut Merah dan Teluk Aden oleh beberapa negara, namun tetap saja korban perompakan tidak reda. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah yang harus dipantau dan hukum internasional tidak menghukum mereka yang ditangkap dan mereka merompak kembali di lain waktu.

D. Solusi Melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB)

Dalam kasus perompakan di perairan laut Somalia, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan Resolusi DK PBB No. 1851 tahun 2008. Resolusi ini memberikan kewenangan kepada negara-negara anggota untuk mengejar perompak tidak hanya laut, tetapi juga masuk ke wilayah darat Somalia.

Resolusi Dewan Keamanan PBB ini memberikan kewenangan pada semua negara di dunia untuk berperan serta aktif dalam upaya penumpasan perompakan di wilayah laut Somalia. Resolusi ini mengundang perhatian banyak ahli hukum internasional karena salah satu isinya memberikan kewenangan kepada negara-negara untuk mengejar dan menumpas perompak tidak hanya di lepas pantai tetapi juga di wilayah darat Somalia. Kewenangan semacam ini meskipun tidak lazim bagi negara berdaulat, namun ternyata dapat diterima secara internasional karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Resolusi 1851 adalah resolusi keempat yang disahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) berkaitan dengan upaya pemberantasan perompakan di wilayah laut Somalia. Upaya seperti bantuan teknis kepada Somalia, pertukaran informasi pergerakan perompak dan pembekuan rekening yang diduga digunakan oleh perompak sebagaimana diatur dalam Resolusi 1846, 1844 dan 1838 ternyata tidak dapat menghentikan atau menurunkan kejahatan pembajakan dan perompakan di Somalia.
2. Kejahatan perompakan di Somalia sangat meresahkan dan berpotensi mengganggu tidak saja perdagangan internasional tetapi juga keamanan dunia karena melibatkan banyak negara yang menjadi korbannya.
3. Kejahatan perompakan telah beberapa kali menghalangi kapal-kapal *World Food Program* untuk menjalankan misi kemanusiaan mengirimkan bahan makanan dan obat-obatan kepada rakyat Somalia yang menjadi korban pertikaian bersenjata. Bahkan uang tebusan diduga kuat dipakai oleh perompak untuk mensuplai persenjataan bagi faksi-faksi yang bertikai di Somalia. Bila tidak dihentikan, maka pertikaian bersenjata di Somalia akan sulit untuk diakhiri.

Oleh karena itu Resolusi 1851 dengan tegas mengajak semua negara yang mempunyai kemampuan untuk bekerjasama memberantas perompakan bersenjata. Negara-negara ini selanjutnya diberi kewenangan untuk menggunakan semua cara yang pantas dan dianggap perlu (*...all necessary measures that are appropriate...*) di Somalia.

E. Upaya Mediasi

Terlepas sifatnya yang mendesak, resolusi ini bukannya tidak menyisakan masalah. Resolusi yang disusun oleh Amerika Serikat dan didukung oleh Belgia, Prancis, Yunani, Liberia dan Korea Selatan ini pada awalnya mendapatkan banyak tantangan dari anggota DK PBB sendiri termasuk Indonesia.

Transitional Federal Government (TFG) yang saat ini memegang pemerintahan di Somalia belum memiliki kontrol penuh dalam mengendalikan keamanan Somalia. Bila tentara negara asing diberi kesempatan untuk mengejar

perompak sampai ke daratan dan pedalaman, maka dikhawatirkan perlawanan dari perompak justru akan dapat mengorbankan rakyat sipil.

Belum lagi kekhawatiran bahwa dalam pengejaran di darat akan sangat sulit membedakan antara perompak dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya. Pengejaran ini justru akan menambah rumit permasalahan perdamaian dan gencatan senjata yang sedang diupayakan oleh PBB di Somalia.

Menurut pendapat peneliti, Indonesia sebagai negara yang juga memiliki masalah dengan tingginya perompakan di Selat Malaka sebelumnya menolak beberapa ketentuan dalam usulan Resolusi tersebut. Di antaranya adalah akan diperbolehkannya untuk menggunakan ruang udara dalam pengejaran perompak ini. Nampaknya Indonesia tidak ingin resolusi ini justru menjadi preseden bagi masuknya kekuatan militer negara lain dalam wilayah darat, laut dan udara Indonesia dalam upaya pemberantasan perompakan.

Akhirnya pada saat disahkannya tanggal 16 Desember 2008, kompromi tercapai. Kewenangan yang diberikan kepada kekuatan militer negara lain untuk memasuki wilayah darat Somalia tidak dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, sehingga penerapannya di masa depan tidak dapat disamakan kepada semua negara.

Negara yang akan memasuki wilayah Somalia dalam upaya pengejaran pembajak sebelumnya harus dengan pemberitahuan sebelumnya kepada TFG. Penggunaan ruang udara tidak disebutkan dalam langkah-langkah yang dapat diambil pada upaya pemberantasan perompakan di Somalia. Oleh karena itu pengejaran perompak di darat harus tetap mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan hak asasi manusia internasional.

F. Pengaturan Melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 (LN RI Tahun 1985 Nomor 3319) tentang Pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 19182)

Pengaturan hukum laut nasional di Indonesia merupakan produk hukum internasional yang telah diratifikasi ke dalam undang-undang nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 (LN RI Tahun 1985 Nomor 3319) tentang Pengesahan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 19182).

Pembajakan di laut (*piracy*) merupakan kejahatan internasional (*international crime*) yang memberikan yurisdiksi kepada Negara manapun untuk mengambil langkah tegas terhadapnya. Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (UNCLOS 1982) terdapat definisi yang berbeda antara pembajakan dan perompakan sebagaimana diatur pada Pasal 101 dan Pasal 102.

Kapal asing yang menyerang kapal perompak di kawasan hak berdaulat suatu negara misalnya di perairan ZEE tergolong sebagai '*armed robbery against ship*' atau penyerangan senjata melawan kapal. Menjadi sulit bagi kapal asing terkait identitas tersebut untuk melakukan penindakan terhadap pembajak dan perompak Somalia. Berdasarkan Pasal 107 UNCLOS 1982 Kapal perang negara yang diijinkan dan dapat melakukan penyerangan maupun penangkapan harus memiliki otoritas yuridiksi eksklusif yang diberikan oleh negara kapal perompak. Melalui ketentuan tersebut peneliti menganalisa bahwa penangkapan terhadap kapal perompak sangat sulit dan tidak mungkin karena kapal asing tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah kedaulatan suatu negara untuk melakukan penangkapan dan penyerangan terhadap kapal pembajak dan perompak. Penindakan tidak mungkin terjadi terhadap perompak, sehingga penangkapan pun menjadi tindakan yang tidak mungkin terjadi pula. Sedangkan sanksi menurut Pasal 105 UNCLOS 1982 hanya dapat dijatuhkan melalui pengadilan domestik negara asal perompak.

Berdasarkan konvensi hukum konvensi laut internasional, definisi perompakan yang diatur secara penuh oleh hukum nasional masing-masing negara diartikan sebagai 'perampokan laut'. Hukum nasional hampir tidak pernah mengijinkan kapal perang dari negara lain untuk melakukan intervensi, sehingga tindakan penanggulangan terhadap pembajakan dan perompakan tidak dimuat dalam hukum internasional dan bersifat politis. Perompak dan pembajak merupakan subyek dari yuridiksi negara saat perompakan dan pembajakan terjadi di dalam wilayah perairan teritorial suatu negara. Negara memiliki kedaulatan penuh untuk menghukum tindakan kriminal tersebut.

G. Pengaturan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Sebagai negara kepulauan yang memiliki luas wilayah laut 2/3 dari daratan, maka Indonesia didominasi oleh perairan laut yang memiliki potensi

sumber daya alam yang sangat kaya untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain potensi tersebut juga mengandung kerawanan dan potensi ancaman keamanan khususnya pada jalur pelayaran internasional yang rawan akan tindak kejahatan perompakan.

TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan dan keamanan di laut memegang peranan yang besar dalam melakukan pengamanan dan penjagaan di wilayah perairan laut, di mana secara universal TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi. Peran polisionil dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumberdaya dan kekayaan laut nasional, serta memelihara keamanan dan ketertiban di laut. Secara yuridis formal ketiga peran ini telah diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas TNI Angkatan Laut, hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut bertugas melaksanakan tugas di bidang pertahanan, menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, serta melakukan diplomasi angkatan laut. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut dituntut untuk mampu melaksanakan peran dan tugasnya secara maksimal dalam rangka menegakan kedaulatan dan hukum di wilayah laut.

Dalam pengaturan tugas TNI AL sebagaimana diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur secara *Les Specialist* tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur kewenangan pelaksanaan tugas operasi militer selain perang (OMSP) di luar yurisdiksi nasional. Tidak diaturnya tugas yang diemban oleh TNI AL di laut di luar yurisdiksi nasional dapat menimbulkan kerancuan dan permasalahan kewenangan. Oleh karena itu perlu adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur kewenangan melaksanakan OMSP hingga di luar laut yurisdiksi nasional.

H. Kekosongan Hukum Pengaturan OMSP TNI AL dalam Menanggulangi Tindak Pembajakan dan Perompakan di Luar Yurisdiksi Nasional Menurut Hukum Internasional

Dari pemaparan tentang pengaturan kewenangan TNI AL melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) di luar yurisdiksi nasional diketahui terdapat kekosongan norma yang mengaturnya. Kekosongan norma pengaturan tersebut dapat berdampak pada kerancuan pelaksanaan operasi yang diselenggarakan TNI AL baik pada aspek organisasi, kesiapan Alutsista, hubungan diplomatik, penyelesaian hukum, anggaran dan sumber daya manusia.

Beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tugas TNI AL yang diatur pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation of the Law of the Sea (UNCLOS 1982), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pertahanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, tidak ada satupun pasal yang mengatur kewenangan TNI AL dalam melaksanakan tugas di luar yurisdiksi nasional. Pelaksanaan tugas TNI AL dalam memberantas pembajakan yang terjadi di perairan laut Somalia justru didasarkan pada Resolusi DK PBB. Oleh karena itu perlu ada payung hukum bagi kelembagaan TNI AL setingkat undang-undang dalam pengaturan tugas di luar yurisdiksi nasional baik dalam menanggulangi pembajakan maupun perompakan.

Kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan tugas OMSP TNI Angkatan Laut perlu mendapat perhatian khusus bagi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Mabes TNI dan TNI Angkatan Laut agar penanggulangan pembajakan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di luar laut yurisdiksi nasional perlu memperhatikan beberapa prinsip dan ditambahkan dalam tugas pokok TNI Angkatan Laut sebagai mana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai berikut:

1. Prinsip pengaturan wewenang TNI Angkatan Laut melakukan penindakan pembajakan dan perompakan yang terjadi atas kapal bendera Indonesia baik di dalam maupun di luar laut yurisdiksi nasional.

2. Prinsip pengaturan penggunaan kekuatan armada kapal perang dan pesawat udara dalam upaya penanggulangan pembajakan dan perompakan yang terjadi baik dalam maupun di luar laut yurisdiksi nasional.
 3. Prinsip pengaturan kerjasama TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Negara Kasawan ASEAN dalam menjaga keamanan laut.
- Dari berbagai prinsip-prinsip sebagai solusi dalam melaksanakan penanggulangan pembajakan di luar laut yurisdiksi nasional dapat dijadikan rujukan dalam membentuk aturan hukum dalam melengkapi kewenangan TNI AL sebagaimana diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Simpulan

1. Pelaksanaan penanggulangan pembajakan dan perompakan dalam operasi militer selain perang (OMSP) TNI AL secara yuridis belum diatur dalam hukum nasional berkaitan pengerahan kekuatan militer Angkatan Laut dalam melaksanakan operasi penanggulangan pembajakan dan perompakan di luar laut yurisdiksi nasional. Beberapa ketentuan hukum internasional dan nasional mengatur kewenangan kapal perang dan pesawat pemerintah yang dapat diinterpretasikan sebagai tugas yang diemban oleh TNI AL melakukan tindakan penanggulangan pembajakan dan perompakan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan penanggulangan pembajakan dan perompakan hanya dapat dilakukan oleh kapal perang dan pesawat udara militer sebagaimana diatur dalam hukum internasional maupun nasional khususnya hukum laut internasional yaitu pada United Convention of the Law of the Sea (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1995 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982.
 - b. Penanggulangan pembajakan dan perompakan di kawasan ASEAN dilakukan melalui kerjasama negara kawasan Asean Regional Forum (ARF).
2. Pelaksanaan tugas operasi militer selain perang (OMSP) TNI AL dalam menanggulangi pembajakan dan terorisme di luar laut yurisdiksi nasional

dalam praktik selama ini dapat dilaksanakan dengan baik meskipun tidak didasarkan pada hukum nasional. Pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) TNI AL dalam penanggulangan pembajakan dan perompakan di luar perairan laut yurisdiksi nasional secara hukum nasional belum diatur secara rinci khususnya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Operasi penumpasan pembajakan yang dilakukan TNI AL dalam membebaskan KM Sinar Kudus di perairan Somalia pada tahun 2011 dilaksanakan melalui Satuan Tugas Duta Samudera. Upaya pembebasan kapal dari pembajakan oleh TNI Angkatan Laut dilakukan melalui integrasi kerjasama antar negara kawasan ASEAN dan mengerahkan kekuatan Armada dan pasukan elit terbaik dari TNI AL dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas) Duta Samudera.

3. Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas operasi militer selain perang TNI AL dalam menanggulangi pembajakan dan perompakan di luar perairan laut yurisdiksi nasional dalam praktik dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu adanya payung hukum nasional dalam pengerahan kekuatan militer Angkatan Laut pada tataran undang-undang dan doktrinal internal di lingkungan TNI dan TNI AL.
4. Pelaksanaan penanggulangan pembajakan dan perompakan hanya dapat dilakukan oleh kapal perang dan pesawat udara militer oleh karena itu perlu diatur secara rinci dalam hukum nasional khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Prinsip menghormati kedaulatan negara pantai atas wilayah laut teritorial dan hak berdaulat di zona laut ZEE, Zona Tambahan dan zona landas kontinen.
 - b. Prinsip kerjasama negara kawasan secara aktif dalam pelaksanaan fungsi kehadiran Armada di laut lepas dan terkoordinir dalam penanggulangan pembajakan dan perompakan.
 - c. Prinsip penggunaan teknologi terkini dan kekuatan militer dalam pengerahan Armada kapal perang dan pesawat udara dalam

penanggulangan pembajakan di laut lepas dan perompakan di laut teritorial.

- d. Prinsip pengumpulan data inteligen aktifitas pembajak dan perompak melalui teknologi informatika.
- e. Prinsip kerjasama yang didasarkan pada perjanjian bilateral maupun multilateral dan hubungan diplomatik antar negara kawasan maupun dengan negara dari aktor pembajakan.
- f. Prinsip penyelesaian pembajakan dan perompakan melalui jalur peradilan kriminal, *mutual legal assistance* dan ekstradisi.
- g. Prinsip pengaturan hukum positif dalam undang-undang masing-masing negara dalam melibatkan kekuatan militer untuk menanggulangi pembajakan dan perompakan di luar laut yurisdiksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Geoffrey Till, 2009, **Seapower A Guide for the Twenty-First Century**, Routledge, USA dan Canada.
- Huala, Adolf, 2002, **Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional**, Grafindo Persada, Bandung.

Jurnal

- Keliat, Makmur, 2009, **Kemanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya bagi Indonesia**, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 13, No. 1, Juli 2009. FISIP, Universitas Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1982 (LN RI Tahun 1982 Nomor 76) tentang **Ratifikasi United Nation of the Law of the Sea**.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 Nomor 3) tentang **Pertahanan Negara**.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127) tentang **Tentara Nasional Indonesia**.
- Mabesal, 2006, **Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya**, Jakarta.
- Kementerian Pertahanan RI, 2008, **Buku Putih Pertahanan Indonesia**, Jakarta.

Naskah Internet

- Ali Ridlo, S.H., M.M, **Bila Letkol Ali Ridlo Bicara Soal UU Pertahanan Negara dan UU TNI**, <http://www.tnial.mil.id>.
- Willy F. Sumakul, **Operasi Keamanan Laut dan ASEAN Maritim Forum** <http://www.fkpmaritim.org>.
- Alman Halves Ali, **Operasi TNI Angkatan Laut di Luar Wilayah Yurisdiksi Nasional Suatu Tinjauan**, <http://www.fkpmaritim.org>.